



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NURHAFIZAL
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 89040

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.833.960.000

1. Tanah Seluas 222 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 121 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/60 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/35 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 3530 m2 di PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 247.100.000
6. Tanah Seluas 2954 m2 di PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 88.620.000
7. Tanah Seluas 1608 m2 di PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 48.240.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 120.000.000

1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 1,3 G MIT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA YIG02N02LO AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
4. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 558.050.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	94.694.770
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.606.704.770
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.606.704.770

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.